



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan kuantitas dan kualitas program pembangunan menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya instansi pemerintah (SKPD) yang menjadi lembaga pelaksana program pembangunan di daerah. Banyak hal yang harus diperhatikan pemerintah daerah dan masyarakat, dimana khususnya Pemerintah sebagai fasilitator pembangunan harus mampu menciptakan system yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasinya, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat melalui program pembangunan dapat terwujud. Prinsip “Good Governance” atau pemerintahan yang baik bercirikan pembangunan yang mengutamakan profesionalitas, transparan, efektif, efisien, akuntabel, pelayanan prima, demokratis dan adanya supremasi hukum yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Untuk tercapainya hal itu, kegiatan yang dilakukan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar selama kurun waktu tahun 2010 senantiasa berpedoman kepada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan KBPP Kota Denpasar 2010-2015. Hal tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang juga menetapkan rencana strategis. Renstra merupakan suatu proses perencanaan yang



berorientasi pada pencapaian hasil selama kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam mencapai visi-misi, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 1012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012

Sesuai dengan pedoman terbaru, pihak yang diwajibkan menyampaikan Lakip adalah Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar merupakan Unit Pelayanan Teknis Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan Lakip sebagai wujud



pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah berjalan pada tahun bersangkutan.

Sebagai Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Denpasar maka Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar mempunyai tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut:

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar .

2. Tujuan :

- a) Memberikan Informasi mengenai capaian Kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar.
- b) Bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Denpasar untuk perbaikan untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya.
- c) Menyatakan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas



dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya.

- d) Dorongan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Untuk hal tersebut diatas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar dituntut untuk meningkatkan pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas, peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan di 2 bidang yang merupakan 2 urusan wajib pemerintah daerah ini maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008. tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar dibentuklah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar.

1.2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Lembaga Teknis, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Fungsi



Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi.
2. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Badan dalam lingkup tugasnya
4. Melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kewenangan

Melaksanakan Program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.3 Isu – isu Strategik

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar mendapatkan beberapa tantangan / Masalah yang harus dihadapi dalam meningkatkan pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas, peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak yaitu:

1. Angka pemakaian kontrasepsi jangka panjang makin menurun ;
2. Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi remaja (PKBR);



3. Masih rendahnya pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ;
4. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja;
5. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB;
6. Masih ada kesenjangan gender dalam pembangunan
7. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.
8. Masih tingginya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, trafficking
9. Masih adanya masalah kematian ibu hamil dan melahirkan (AKI)
10. Masih rendahnya keterwakilan perempuan pada jabatan publik dan politik
11. Masih adanya beberapa peraturan Perundang undangan yang bias gender
12. Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan daripada laki laki
13. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih kurang



1.3.1 Analisis Internal dan Eksternal

Berdasarkan permasalahan/kendala yang dihadapi sesuai dengan isu strategis yang berkembang saat ini dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar melakukan kajian internal dan eksternal melalui identifikasi masalah dengan analisis SWOT sebagai berikut :

a. Faktor lingkungan Internal

Kekuatan (*Strenght*) :

1. Undang Undang Dasar 1945 (pasal 28);
2. Terbentuknya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008;
3. RPJMD dan APBD Kota Denpasar;
4. Terjalinnnya koordinasi dan kemitraan yang kuat dengan lembaga pemerintah, baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta non pemerintah dalam pelaksanaan tugas terkait dengan upaya peningkatan Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;.



5. Efektivitas dan Efisiensi dalam pengelolaan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mengharuskan menerapkan manajemen prima yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Kuantitas dan kualitas SDM belum memadai
2. Kesenjangan Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana
3. Sarana dan prasarana operasional pergerakan masyarakat masih kurang

1.3.2 Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

1. Keikutsertaan Indonesia dalam *Milenium Development Goals* (MDGs). tahun 2000, Indonesia bersama 188 Negara ikut menandatangani *Milenium Development Goals* (MDGs) yang terdiri dari 8 butir yaitu :

1.1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan;

1.2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua;



-
- 1.3. Mendorong kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;
 - 1.4. Menurunkan angka kematian anak;
 - 1.5. Menurunkan angka kematian ibu;
 - 1.6. Memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular Lainnya;
 - 1.7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup;
 - 1.8. Membangun kemitraan global.

Dari delapan butir tersebut enam butir terkait langsung dengan isu gender serta pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

2. Undang Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, maka BKKBN diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional.
3. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya revitalisasi Keluarga Berencana menjadi bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 2010 – 2014.
4. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan program KB Nasional.
5. Keinginan masyarakat untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
6. Pencanaan Denpasar Kota Layak Anak



b. Ancaman/Tantangan (*Threats*)

1. Masyarakat yang menganut budaya patrilineal belum sepenuhnya bisa menerima bahwa laki laki dan perempuan sama.
2. Meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dan maraknya pelecehan seksual, trafficking, gepeng.
3. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok kelompok kegiatan untuk peningkatan pembinaan dan kemandirian peserta KB
4. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
5. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Revitalisasi keluarga berencana
2. Memasyarakatkan Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja
3. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
4. Memperkuat kelembagaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera



5. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan
6. Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
7. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
8. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
9. Melaksanakan penerapan tata kelolapemerintahan yang baik
10. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pemerintah
11. Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah daerah

Dari 11 strategi tersebut maka akan tampak pada tujuan dalam pembangunan lima tahun kedepan, adapun tujuan pembangunan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Membangun kependudukan dan keluarga berencana
2. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
3. Meningkatkan manajemen akuntabilitas dan peningkatan kualitas SDM Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar aparatur dan sarana prasarana



1.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Lembaga Teknis, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

1.4.1 Tugas Pokok

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar mempunyai Tugas Pokok :

Melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi.

1.4.2 Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Badan dalam lingkup tugasnya

1.4.3 Struktur organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Kota Denpasar dibantu oleh :

1. Sekretariat



-
- 1.a. Subbagian Perencanaan
 - 1.b. Subbagian Keuangan
 - 1.c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - 2.a. Subbidang Operasional Keluarga Berencana / Kesehatan Reproduksi
 - 2.b. Subbidang Operasional Keluarga Sejahtera / Pemberdayaan Keluarga
 3. Bidang Penggerakan Masyarakat
 - 3.a. Subbidang Insitusi dan Peran Serta
 - 3.b. Subbidang Advokasi dan KIE
 4. Bidang Data dan Informasi
 4. a. Subbidang Pelaporan dan Pengolahan Data
 4. b. Subbidang Data dan Evaluasi Program
 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 5.a. Subbidang Pemberdayaan Perempuan
 - 5.b. Subbidang Perlindungan Anak
 6. UPTB KBPP di 4 Kecamatan
 - 6.a. Tata Usaha UPTB KBPP di 4 Kecamatan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional



Secara rinci struktur organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar terdapat pada lampiran 1.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang dibuatnya laporan, Gambaran umum ,isu strategis yang menguraikan tentang potensi dan kelemahan yang ada pada Badan KBPP, Struktur Organisasi , juga menjelaskan tugas dan fungsi Badan KBPP Kota Denpasar.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menguraikan tentang Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran dan cara mencapai sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan, program serta kegiatan , serta Perjanjian kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang pencapaian sasaran, pencapain kinerja ,keberhasilan dan kegagalan yang telah diperoleh dengan membandingkan keberhasilan tahun sebelumnya dan target sasaran

Bab IV Penutup, merupakan kesimpulan dari semua laporan yang juga berisikan saran kepada semua pihak,dilengkapi dengan lampiran-lampiran.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN

Rencana strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar diawali penyusunannya mulai Tahun 2011-2015. Dengan terbentuknya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar yang berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 maka renstra Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar disusun sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan dibidang urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan secara umum sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan Visi dan Misi.

Renstra Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar meliputi Visi, Misi, Sasaran dan cara mencapai sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan, program serta kegiatan :

II.1.1 Visi

Dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar dengan Visi “Seluruh Keluarga Ikut KB serta Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak “



Visi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Keluarga yang sejahtera, sehat, rajin mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

II.1.2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi Badan Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Membangun setiap keluarga untuk memiliki anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan dan terpenuhinya hak-hak reproduksinya melalui pengembangan kebijakan penyediaan dan layanan promosi, fasilitasi perlindungan , informasi kependudukan dan keluarga serta penguatan kelembagaan dan jaringan KB dalam arti mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
2. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
3. Meningkatkan manajemen akuntabilitas dan peningkatan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana aparatur.



II.1.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai luhur dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan yang lebih baik, dengan berdasarkan pada kriteria – kriteria dan kewenangan yang mudah dipahami oleh masyarakat . Keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan strategis dapat diukur apabila memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut antara lain :

1. Meningkatnya pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas
2. Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
3. Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas dan peningkatan kualitas SDM
aparatur, sarana dan prasarana

Untuk mewujudkan misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar ditempuh melalui strategi dan beberapa kebijakan yang satu dengan yang lainnya saling terkait sebagai berikut :

Misi I : Membangun setiap keluarga untuk memiliki anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan dan terpenuhinya hak- hak reproduksinya melalui pengembangan kebijakan penyediaan dan layanan promosi, fasilitasi perlindungan , informasi kependudukan dan keluarga serta penguatan



kelembagaan dan jaringan KB dalam arti mewujudkan Keluarga
Kecil Bahagia Sejahtera

Tujuan : Membangun kependudukan dan keluarga
berencana serta keluarga berkualitas

Misi II : Meningkatkan kualitas hidup dan peran
perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan
anak.

Tujuan : Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran
perempuan serta kesejahteraan dan
perlindungan anak

Misi III : Meningkatkan manajemen akuntabilitas dan
peningkatan kualitas SDM aparatur, sarana dan
prasarana aparatur.

Tujuan : Meningkatnya manajemen dan akuntabilitas dan
peningkatan kualitas SDM aparatur, sarana dan
prasarana aparatur



II.1.4. Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar ditempuh melalui strategi dan sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran pertama adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Sasaran kedua adalah : Meningkatnya pelaksanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana
3. Sasaran ketiga adalah : Meningkatnya pemakaian kontrasepsi
4. Sasaran keempat adalah : Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi
5. Sasaran kelima adalah : Tersedianya data dan informasi pendataan keluarga berencana
6. Sasaran keenam adalah : Menurunnya kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki
7. Sasaran ketujuh adalah : Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
8. Sasaran kedelapan adalah : Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 9 . Sasaran kesembilan adalah Meningkatnya pemenuhan hak anak (Menuju Kota Layak Anak)



II.1.5. Strategi dan arah kebijakan

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, Badan KBPP Kota Denpasar menyusun Strategi dan Arah kebijakan Pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :

a. Strategi :

1. Revitalisasi Keluarga Berencana
2. Memasyarakatkan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja
3. Meningkatkan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga .
4. Memperkuat Kelembagaan Keluarga Kecil Bahagia dan sejahtera
5. Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
6. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
7. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

b. Kebijakan :

- 1) Meningkatkan keluarga kecil bahagia sejahtera, dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi .
- 2) Meningkatkan penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien dan menjamin ketersediaan alat/obat kontrasepsi dengan prioritas keluarga miskin .



-
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan reproduksi remaja
 - 4) Mengembangkan kebijakan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, menyelenggarakan promosi kesehatan reproduksi remaja, pencegahan HIV/AIDS dalam bahaya NAPZA, Konseling , komonikasi, informasi dan edukasi serta advokasi bagi masyarakat, keluarga dan remaja.
 - 5) Mengembangkan cakupan kualitas kelompok bina keluarga
 - 6) Meningkatkan promosi kesehatan ibu, bayi dan anak
 - 7) Membina dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk peningkatan cakupan dan mutu pelayanan KB, Kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta pengelolaan data dan informasi
 - 8) Meningkatkan ketertiban perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
 - 9) Meningkatkan tarap pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya perempuan
 - 10) Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan , eksploitasi dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga serta meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak



-
- 11) Mengembangkan kapasitas kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusuteraan gender dan anak dalam perencanaan , pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan di segala bidang

II.1.6. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil ataupun yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBN atau APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah serta kinerjanya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka program Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar 5 (lima) tahun mendatang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



-
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 4. Program Keluarga Berencana.
 5. Program Pelayanan Kontrasepsi .
 6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 7. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR .
 8. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.
 9. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak .
 10. Program Penyiapan Tenaga Pendampingan Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan .
 11. Program Pengembangan model Operasional BKB –Posyandu - PAUD .
 12. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
 13. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualits Anak dan Perempuan
 14. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 15. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 16. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
 17. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak



Untuk lebih jelasnya Strategi dan Arah kebijakan Badan KB dan PP Kota Denpasar terdapat pada tabel Strategi dan Arah Kebijakan;

Tabel 2.2

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar .

Visi : “ Seluruh Keluarga Ikut KB serta Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak “ . Visi ini dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera , sehat, rajin mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .

Misi ke -satu : Membangun Kependudukan dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.Meningkatnya pelaksanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana .	1. Meningkatkan Pelayanan Kependudukan , Keluarga Berencana.	1.Revitalisasi Keluarga Berencana . 2.Memasyarakatkan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja 3. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga 4. Memperkuat	1.Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB, Peningkatan KIE bagi PUS, melindungi peserta KB dari dampak



		kelembagaan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera	negatif penggunaan alat atau obat kontrasepsi, Peningkatan kualitas penyediaan dan pemamfaatan alat dan obat kontrasepsi dan meningkatnya pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif dan efisien untuk jangka panjang
--	--	---	--



Misi ke-dua : Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan serta Kesetaraan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.	1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.	1.Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan . 2, Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 3.Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 4. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1.Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik dan jabatan publik 2. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya perempuan 3. Menyempurnakan perangkat hukum pidana



			<p>yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga serta meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>4. Mengembangkan kapasitas kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam</p>
--	--	--	--



			perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan di segala bidang
--	--	--	---

Misi ke-tiga : Meningkatkan Meningkatkan Managemen, Akuntabilitas dan Peningkatan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana aparatur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.Meningkatkan Managemen, Akuntabilitas dan Peningkatan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana aparatur	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).	1.Melaksanakan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik 2. meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pemerintah	1.Menerapkan Prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pada semua lini pemerintahan pada semua kegiatan



		3. Meningkatkan Profesionalisme aparat pemerintahan daerah .	2. Mengembangkan kapasitas aparatur pemerintahan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki 3. Meningkatkan kualitas dan fasilitas sarana pelayanan umum 4. membangun dan memelihara sarana pelayanan umum
--	--	--	--

II.I.6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar Tahun 2015 disusun berdasarkan perencanaan strategis jangka menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010-2015 dan



selaras dengan perencanaan strategis SKPD yang tertuang didalam RENSTRA SKPD Badan KBPP Tahun 2010-2015. Disamping itu penyusunan rencana kinerja tahunan seiring dengan kebijakan anggaran dan komitmen SKPD untuk mencapainya dalam tahun bersangkutan seperti tertera pada Lampiran Rencana Kinerja Tahun 2015.

II.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada hakekatnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tahun tertentu (2015) dengan mempertimbangkan sumber yang ada. Tujuan Perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar.

Badan keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2015 yang ditandatangani oleh Walikota Denpasar. Ringkasan Perjanjian Kinerja tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran A



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Pengukuran capaian Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi dan tujuan organisasi. Sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, disamping juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban pemerintah sebagai pengemban amanah dan pelaksana pembangunan seperti yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan dengan berjalannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat menjadi bahan evaluasi yang efektif sebagai upaya perbaikan kinerja.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar sebagai unit pelaksana Pemerintah Kota Denpasar berkewajiban menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai ketentuan dan persyaratan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri tentang Penyusunan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi lima komponen



manajemen kinerja meliputi : Perencanaan kinerja, pengukuran Kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

Kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan yang dilakukan melalui analisis perbandingan rencana kinerja terhadap realisasi kinerja. Pencapaian sasaran diperoleh dengan membandingkan realisasi terhadap target indikator sasaran yang telah ditetapkan pada tahun berjalan. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan ditetapkan berdasarkan standar penilaian dari hasil pengukuran yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.1

No.	Katagori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 85-100	Memuaskan
2	A	> 75-85	Sangat Baik
3	B	> 65-75	Baik
4	CC	> 50-65	Cukup Baik
5	C	> 30-50	Agak Kurang
6	D	0-30	Kurang



Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja sehingga diperoleh informasi tingkat keberhasilan dan alasan penyebab tercapainya target kinerja maupun belum tercapainya target kinerja pada tahun berjalan.

Dokumen Renstra Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar Tahun 2010-2015 sesuai SK Kepala Badan KB dan PP Kota Denpasar menetapkan 9 sasaran dan 22 indikator kinerja (out come) berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan KB dan PP Kota Denpasar dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) .

Sasaran 2

Meningkatnya pelaksanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana

Sasaran 3

Meningkatnya pemakaian kontrasepsi

Sasaran 4

Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi

Sasaran 5

Tersedianya data dan informasi pendataan keluarga berencana



Sasaran 6

Menurunnya kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki

Sasaran 7

Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Sasaran 8

Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Sasaran 9

Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak (Menuju Kota Layak Anak)

III.2. Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas /pemberi amanah.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar selaku pengemban amanah dari masyarakat Kota Denpasar berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan KB dan PP sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/X/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan KB dan PP yang pada umumnya telah berjalan dengan baik walaupun ada beberapa kendala dan



hambatan yang bersifat administratif akibat perubahan kebijakan internal.

Akan tetapi kalau dilihat berdasarkan pencapaian sasaran-sasaran strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2015	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	1	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	85%	85%	100
		2	Jumlah laporan kinerja akuntabilitas kinerja yang disusun tepat waktu			
2	Meningkatkan pelaksanaan pelaksanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana	1	Jumlah Peserta KB baru	14.031	14.421	102,78
		2	Rata-rata anak dalam keluarga	2	2.1	95,24
		3	Prosentase peserta KB Aktif terhadap pasangan usia subur (PUS)	83,31%	79,19%	95,05%
		4	Prosentase KB Pria terhadap peserta KB Aktif	3%	4,67%	153,33%
3	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi	1	Menurunnya angka unmetneed	5%	6,70%	74,63%
		2	Prosentase anggota BKB yang ber KB	89,89%	85,59%	95,65%
		3	Prosentase anggota BKR yang Ber KB	80,09%	83,45%	104,20%
		4	Prosentase anggota UPPKS yang ber KB	38,78%	8,73%	22,51%
4	Meningkatnya pengetahuan remaja	1	Prosentase jumlah PUS yang di KIE	30%	100%	100%



	tentang kesehatan reproduksi	2	Prosentase sekolah yang memiliki PIK KRR	3%	8,33%	277,67%
		3	Prosentase cakupan istri kurang dari 20 tahun	0,42%	0,40%	95,24%
		4	Prosentase jumlah PUS yang di papsmear	0,25%	0,22%	88%
		5	Cakupan penyediaan alat kontrasepsi untuk memehuni permintaan masyarakat	30%	100	100
5	Tersediannya data dan informasi pendataan keluarga berencana	1	Rasio petugas lapangan keluarga berencana (PPLKB?PLKB)	1	1	200
		2	Rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD, Sub PPKBD)	1	1	100
		3	Jumlah tersediannya data dan informasi keluarga yang tepat waktu	100	100	100
6	Menurunnya kesenjangan pembangunan antaraperempuan dan laki-laki	1	Angka IPG (Indek Pembangunan Gender)	77,82	77,82	100
7	Meningkatnya kesetaan gender dan pemberdayaan perempuan	1	Jumlah kelompok p2WKSS yang dibina	5	5	100
8	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1	Prosentase penanganan kasus kasus KDRT dan Anak	100	100	100
9	Meningkatnya pemenuhan hak anak (Menuju Kota Layak Anak	1	Rredikat dalam evaluasi PUG menuju Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya

Secara umum Badan KBPP Kota Denpasar telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang KBPP dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD Badan Keluarga Berencana dan



Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar Tahun 2011-2015, dari sasaran pertama terhadap 1 (satu) indikator kinerja dalam kurun waktu 2 (dua) tahun belum sesuai dengan target yang diharapkan, dilihat dari perbandingan realisasi Tahun 2014 yang capaian kinerjanya mengalami peningkatan

3.2.1 Sasaran 1 : Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

NO	SASARAN	INDIKATOR IKU	TARGET	REALISASI (2014)	REALISASI (2015)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5		6
1	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	1 Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu 2 Jumlah laporan kinerja akuntabilitas kinerja yang disusun tepat waktu	85 %	83 %	85 %	100

Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di dukung dengan Program Penunjang yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , Program Peningkatan Kapasitas Sumber



Daya Manusia , Dimana realisasi fisik 83 % di tahun 2014 sedangkan 85 % di tahun 2015 artinya realisasi fisik tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun 2014

3.2.2 Sasaran 2 : Meningkatkan pelaksanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana

NO	SASARAN	INDIKATOR IKU	TARGET	REALISASI (2014)	REALISASI (2015)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan pelaksanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana	Jumlah Peserta KB baru	14.031	15.043	14.421	102,78
Rata-rata anak dalam keluarga		2	2	2,1	95,24	
Prosentase peserta KB Aktif terhadap pasangan usia subur (PUS)		83,31 %		79,19 %	95,05	
Prosentase KB Pria terhadap peserta KB Aktif		3 %		4,67 %	153,33	



Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif (PA) adalah jumlah peserta KB aktif (PA) di bandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu . Peserta KB aktif adalah merupakan jumlah kumulatif dari peserta KB yang terus menerus menggunakan salah satu alat, obat, dan cara kontrasepsi di tambah dengan jumlah peserta KB Baru pada Tahun berjalan . Hal ini dilakukan dengan mengajak PUS untuk menjadi peserta KB baru (PB yakni PUS yang baru pertama kali menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi, atau yang menjadi peserta KB setelah melahirkan atau keguguran) dan membina peserta KB Aktif.

Prosentase Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif diperoleh dari jumlah peserta KB aktif dibagi dengan jumlah pasangan usia subur dikalikan 100%.

Target Jumlah peserta KB Baru tahun 2015 adalah 14.031 dengan realisasi 14.421 (102,78 %) sedangkan target jumlah peserta KB Baru tahun 2014 adalah 14.344 dengan realisasi 15.043 (104 %) artinya di tahun 2014 realisasinya lebih tinggi di bandingkan tahun 2015 namun demikian di tahun 2015 pencapaiannya lebih dari yang di targetkan (102, 78 %)

Rata-rata anak dalam keluarga Target 2015 adalah 2,3 realisasi 2,3 pencapaiannya 95, 24

Prosentase peserta KB Aktif terhadap pasangan usia subur (PUS) Target tahun 2015 adalah 83,31 % realisasi 79,19 pencapaian 95,05 % sedangkan di tahun 2014 target 65 % realisasi 83,44 pencapaiannya 128,36 artinya di tahun 2015 pencapaiannya



kelihatan lebih kecil dibandingkan tahun 2014 di karenakan target di tahun 2014 sangat kecil di bandingkan tahun 2015

Prosentase KB Pria terhadap peserta peserta KB Aktif Target tahun 2015 adalah 3 % realisasi 4,67 % pencapaian 153,33 % berarti pencapaian sudah melebihi target di karenakan distribusi kondom lebih tinggi dari pada pecapaian MOP

3.2.3 Sasaran 3 : Meningkatnya pemakaian kontrasepsi

Sasaran	Indikator IKU	Target	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	
Meningkatnya pemakaian kontrasepsi	1	Menurunnya angka unmetneed	5%	4,48 %	6,7 %	74,63
	2	Prosentase anggota BKB yang ber KB	89,89 %	89,88 %	85,59 %	95,56
	3	Prosentase anggota BKR yang Ber KB	80,09 %	83,45 %	83,45%	104,20
	4	Prosentase anggota UPPKS yang ber KB	38,78 %	85,60 %	8,73%	22,51



Target Menurunnya Angka Unmetneed di tahun 2014 yaitu 5 % realisasi 4,48% sedangkan target di tahun 2015 yaitu 5 % realisasi 6,77 % artinya unmetneed di tahun 2015 pecapainnya mengalami **penurunan** dari tahun 2014

Prosentase Anggota BKB yang ber-KB.

Dalam rangka mempercepat capaian kinerja program, melalui program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan

dan pembinaan tumbuh kembang anak yang meliputi program BKB (Bina Keluarga Balita) melalui kegiatan program ini akan lebih banyak peluang untuk memberikan pembinaan kepada keluarga yang memiliki Balita untuk meningkatkan mutu/kualitas kesehatan Ibu dan Anak.

Semakin aktif dan sering dilaksanakan pertemuan para anggota kelompok BKB akan semakin banyak Balita yang sehat, cerdas dan kuat.

Capaian Kinerja tahun 2014 adalah sebesar 89,88% diperoleh dari jumlah target sebesar 70 % sedangkan capaian tahun 2015 adalah 85,59 % dari target 89.89 % .

Angka tersebut diatas menunjukkan bahwa semakin sedikit keluarga memiliki anak. (pasangan baru memiliki anak rata-rata satu orang). Hal ini menunjukkan keberhasilan program KB dari jarak kelahiran antara anak yang pertama dengan anak kedua, karena masing-masing pasangan masih ingin punya anak. artinya capaian kinerja partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak **menurun** dari tahun 2015.



Kendala :

1. Kader selalu berganti ganti sehingga Ilmu pengetahuan dan ketrampilan kader tidak tersampaikan kepada kader baru
2. Regenerasi kader sulit karena adanya kesibukan yang padat di Kota Denpasar

Jalan keluar :

1. Selalu aktif melakukan pembinaan atau pelatihan bagi kader
2. Dalam perekrutan kader di libatkan tokoh agama, Masyarakat,unsus Desa/Kelurahan Regenerasi kader sulit karena adanya kesibukan yang padat di Kota Denpasar
3. Diberikan insentif kader , dan pelatihan kader secara terus menerus.

Prosentase anggota BKR yang ber KB

Target tahun 2015 adalah 80,09 % realisasi 83,45 %pencapaian 104,20% artinya pencapaiannya sudah tinggi dari target yang di tetapkan

Prosentase anggota UPPKS yang ber KB

Kegiatan ini untuk membentuk usaha ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga yang ber- KB, disamping itu pula mereka saling dapat menukarkan pengalaman dalam hal kegiatan usaha-usaha ekonomi yang sesuai dengan ketrampilan dan



kehalian masing-masing melalui kegiatan para anggota kelompok UPPKS.

Kalau dilihat dari pencapaian Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB target tahun 2014 yaitu 87 % realisasi 85,60 % sedangkan target tahun 2015 yaitu 38,78 % realisasi 8,73% dengan nilai 22,51

Kendala :

1. Sulitnya pembentukan kelompok UPPKS yang baru
2. Sulitnya mengumpulkan kader kader karena paginya harus bekerja (mencari nafkah)

Jalan keluar :

Langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Membentuk kelompok UPPKS yang baru.
2. Pembinaan kelompok dimasing-masing desa sesuai dengan usaha yang telah dilaksanakan.
3. Menyelenggarakan lomba-lomba untuk memotivasi peningkatan produktivitas kelompok.
4. Memberikan bantuan peralatan untuk usaha yang disertai dengan bimbingan teknis yang diperlukan.



3.2.4 Sasaran 4 : Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi

No	Sasaran	Indikator IKU	Target	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	
4	Meningkatnya pengetahuan Remaja tentang kesehatan reproduksi	1	Prosentase jumlah PUS yang di KIE	30%	100%	100%	100%
		2	Prosentase sekolah yang memiliki PIK KRR	3%	7,57 %	8,33 %	277.67
		3	Prosentase cakupan istri kurang dari 20 tahun	0,42 %	0,40	0,40	95,24
		4	Prosentase jumlah PUS yang di papsmea	0,25	0,22	0,22	88
		5	Cakupan penyediaan alat kontrasepsi untuk memehuni permintaan masyarakat	30%	28	30	100

Prosentase jumlah PUS yang di KIE target 2015 adalah 30 % realisasi 100 % pencapaian 100 % , target dan realisasi 2014 **tetap sama**

Prosentase sekolah yang memiliki PIK KRR

Target tahun 2015 adalah 3 % realisasi 8,33 % pencapaiannya 277,67 % , target tahun 2014 adlah 3 % realisasi 7,57 % pencapaiannya



252,33 artinya pencapaian di tahun 2015 dibandingkn tahun 2014 **meningkat.**

Prosentase cakupan istri kuarng dari 20 Tahun
Cakupan pasangan Usia Subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun di tahun 2014 yaitu 3,50 % realisasi 0,40 sedangkan di tahun 2015 Target Cakupan pasangan Usia Subur yang istrinya di bawah usia 20 Tahun di tahun 2015 yaitu 0,42 % realisasi 0,40 artinya dan realisasi di tahun 2014 dan 2015 **tetap sama .**

Cakupan penyediaan alat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat : Target tahun 2015 adalah 30 % realisasi 100% pencapaian 100, tahun 2014 target 30 % realisasi 28 % pencapaiannya 93 % artinya pencapaian di tahun 2015 dibandingkn tahun 2014 **meningkat.**

3.2.5 Sasaran 5 : Tersediannya data dan informasi pendataan keluarga berencana .

No	Sasaran	Indikator IKU	Target	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
5	Tersedian ya Data dan Informasi Pendataan Keluarga Berencana	1 Rasio petugas lapangan keluarga berencana (PPLKB?PLKB)	1	1	1	200
		2 Rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD, Sub PPKBD)	1	1	1	100
		3 Jumlah tersediannya data dan informasi keluarga yang tepat waktu	100	100	100	100



Target Ratio petugas lapangan Keluarga Berencana /Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas disetiap 2 (dua) Desa/ Kelurahan di tahun 2014 yaitu 2 realisasi 100 sedangkan di tahun 2015 Target Ratio petugas lapangan Keluarga Berencana /Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas disetiap 2 (dua) Desa/ Kelurahan di tahun 2015 yaitu 2 realisasi 100 artinya target dan realisasi di tahun 2014 dan 2015 **tetap sama** .

Rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD, Sub PPKBD) target tahun 2014 adalah 1 realisasi 1 , target tahun 2015 adalah 1 realisasi 1 artinya target dan realisasi di tahun 2014 dan 2015 **tetap sama**

Kendala

Dalam rangka meningkatkan peserta KB aktif terhadap peserta KB Aktif Badan KBPP Kota Denpasar secara umum mengalami beberapa kendala :

1. Partisipasi Pria dalam ber KB masih rendah
2. Tenaga penyuluh KB atau petugas PKB dalam melaksanakan KIE , konseling KB belum maksimal

Jalan keluar :

1. Meningkatkan Penyuluhan / Sosialisasi KB pria dan KIE dengan mengajak motivator KB pria (Testimoni KB Pria) dan dengan memberikan rieward kepada calon peserta KB Pria (yang ikut melaksanakan MOP) Medis Operasi Pria.



2. Mengoptimalkan kemampuan PKB membuat penajaman wilayah sasaran, memberikan ketrampilan KIE dan konseling KB bagi PPKBD dan Sub PPKBD

3.2.6 Sasaran 6: Menurunnya kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki .

NO	SASARAN	INDIKATOR IKU		TARGET	REALISASI (2014)	REALISASI (2015)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3		4	5	6	7
6	Menurunnya kesenjangan pembangunan antarapempuan dan laki-laki	1	Angka IPG (Indek Pembangunan Gender)	77,82	77,82 (data tahun 2013)	77,82 (data tahun 2013)	100

Data yang di sajikan masih IPG tahun 2013 adalah 77,82



3.2.7 Sasaran 7: Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan .

NO	SASARAN	INDIKATOR IKU	TARGET	REALISASI (2014)	REALISASI (2015)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6	7
7	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1 Jumlah kelompok P2WKSS yang dibina	5 Klp	4 klp	5 klp	100

Jumlah kelompok P2WKSS yang dibina tahun 2014 adalah 4 kelompok sedangkan di tahun 2015 adalah 5 kelompok artinya jumlah kelompok P2WKSS yang di bina tahun 2015 **meningkat**

3.2.8 Sasaran 8: Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

NO	SASARAN	INDIKATOR IKU	TARGET	REALISASI (2014)	REALISASI (2015)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6	7
7	Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1 Prosentase penanganan kasus kasus KDRT dan Anak	100	100	100	100



Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sama dengan Jumlah pengaduan/laporan yang masuk ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) artinya semua pengaduan yang di masuk ke P2TP2A sudah ditangani dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jumlah kasus yang di tangani tahun 2014 adalah 44 kasus sedangkan kasus yang di tangani tahun 2015 adalah 107 kasus

Kendala :

Kendala yang di hadapi adalah belum terkoordinasikan dengan baik lembaga lembaga yang berperan dalam meminimalisir kasus kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Jalan keluar :

Upaya yang dilakukan sebagai jalan keluar adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Denpasar dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar



3.2.9 Sasaran 9: Meningkatnya pemenuhan hak anak (Menuju Kota Layak Anak)

NO	SASARAN	INDIKATOR IKU	TARGET	REALISASI (2014)	REALISASI (2015)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6	7
7	Meningkatnya pemenuhan hak anak (Menuju Kota Layak Anak)	1 Predikat dalam evaluasi PUG menuju Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya	100

Denpasar dalam Evaluasi menuju Kota Layak anak tahun 2014 mendapat katagori Nindya , di tahun 2015 mendapat katagori Nindya , di Kabupaten /Kota wilayah Indonesia hanya 3 kota yang mendapat predikat Nindya (Kota Denpasar,Kota Surabaya, dan Kota Surakarta)

Pencapaian Komitmen Kinerja Program (KKP) tahun 2015 pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar



NO	INDIKATOR KOMITMEN KINERJA PROGRAM	KKP 2015	Penc.	% thn. KKP
1	2	3	4	5
1	CPR	50,32	79,31	157,61
2	Jumlah Seluruh Kb Aktif	62.133	64.187	103,31
3	Jumlah Seluruh KB Aktif MKJP	27.794	32.456	116,77
	* IUD	18.305	27.403	149,70
	* MOW	8.888	4.458	50,16
	* IMPLANT	431	508	117,87
4	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP + Kondom)	4.122	3.000	72,78
	*Kondom	3.952	2.913	73,71
	*MOP	170	87	51,18
5	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	14.031	14.421	102,779
6	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru MKJP	2429	6.166	253,85
	* IUD	2079	4580	220,30
	* MOW	192	1173	610,94
	* IMPLANT	136	363	266,91
7	Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP + Kondom)	1.751	1526	87,15
	*Kondom	1.729	1526	88,26
	*MOP	22	0	0,00
8	Persentase PUS Anggota Poktan BKB yang ber KB	89,89	85,59	95,56
9	Persentase PUS Anggota Poktan BKR yang ber KB	80,09	83,45	104,20
10	Persentase PUS Anggota Poktan BKL yang ber KB	75,38	86,44	114,67
11	Persentase PUS Anggota Poktan UPPKS yang ber KB	38,78	8,73	22,51
12	Unmeetneed	4,1	6,7	163,41
13	Persentase Kab/Kota yang telah membangun data Base PK 2015 dengan cakupan minimal 90% KK	100%	100%	100%



3.3. Akuntabilitas Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam rangka mengelola potensi pendapatan daerah yang diupayakan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang terukur dan rasional.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar adalah salah satu unit teknis Pemerintah Daerah Kota Denpasar dan termasuk kedalam Satuan Kerja Daerah yang disertai tugas dalam penyelenggaraan urusan wajib di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dimana dalam penyelenggaraan program dan kegiatannya tidak ada mengelola pendapatan sehingga pelaksanaan akuntabilitas keuangan terbatas pada pelaporan dan evaluasi Belanja Daerah.

Belanja Daerah dikelompokkan dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung .



Untuk mendukung kegiatan Badan keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar Tahun 2015 mengelola dana Rp. 11.749.464.032,- yang terdiri dari :

NO	Jenis Belanja	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Prosesas e
1	Belanja Tidak Langsung	6.414.184.400,-	6.241.092.254,-	1.730.921,46,-	97,30 %
2	Belanja Langsung	5.335.279.632,-	5.048.036.291,-	2.872.433,41,-	94,62 %
	Jumlah	11.749.464.032,-	11.289.128.545,-	4.603.354,87-	96,08 %

Anggaran yang mendukung Perjanjian kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar tahun 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	- Jumlah Laporan Keuangan yang disusun Tepat Waktu	85	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
	- Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun tepat waktu		1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.237.969.456
			PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	
			1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 840.871.776
			PENINGKATAN	



2 Meningkatkan pelaksanaan pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana	- Jumlah peserta KB Baru	14,031	KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 93.600.000	
	- Rata - rata anak dalam keluarga	2	KELUARGA BERENCANA 1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	Rp. 26.590.000	
	- Prosentase peserta KB aktif terhadap pasangan Usia Subur (PUS)	83,31	2. Promosi Pelayanan Kelangsungan hidup Bayi dan Anak	Rp. 12.150.000	
	- Prosentase KB Pria terhadap peserta KB Aktif	3	3. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Rp. 30.800.000	
			4. Pembinaan Keluarga Berencana	Rp. 25.000.000	
			PELAYANAN KONTRASEPSI 1. Pelayanan Konseling KB	Rp. 200.355.800	
			2. Pengadaan Alat Kontrasepsi	Rp. 41.500.000	
			PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK		
	Meningkatnya Pemakaian	- Menurunnya angka Unmetneed	5		
	3 Kotrasepsi	- Prosentase anggota BKB yang ber KB	89,89		
	- Prosentase anggota BKR yang Ber KB	80,09			



	- Prosentase anggota keluarga UPPKS yang Ber KB	38,78		
4 Meningkatkan Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi			1. Pengumpulan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 2. Penyiapan Tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Rp. 560.780.000
			PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU PAUD	
			1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB - POSYANDU -PAUD	Rp. 129.940.000
				Rp. 55.430.000
	- Prosentase jumlah PUS yang di KIE	30	KELUARGA BERENCANA	
	- Prosentase sekolah yang memiliki PIK KRR	3	1. Pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Rp. 60.800.000
	- Prosentase cakupan istri kurang dari 20 Tahun	0,42		
	- Prosentase jumlah PUS yang dipapsmear		KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	
	- Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi	30	1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Rp. 33.050.000



	permintaan masyarakat			
			2. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Rp. 75.087.000
			PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR	
			1. Fasilitasi forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok sebaya di luar sekolah	Rp. 17.950.000
			PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS	
			1. Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV AIDS	29.000.000
5	Tersedianya Data dan Informasi Pendataan Keluarga Berencana	- Rasio petugas lapangan Keluarga Berencana (PPLKB/PLKB)	1	
		- Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana PPKBD , Sub PPKBD)	1	Rp. 533.092.400
		- Jumlah tersedianya data dan informasi keluarga yang tepat waktu	100	



6 Menurunnya Kesenjangan Pembangunan antara Perempuan dan Laki laki	- Angka IPG (Indek Pembangunan Gender)	77,82	KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	
7 Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	- Jumlah kelompok P2WKSS yang Dibina	5 kelompok	<p>1. Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>2. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>3. Perumusan Kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik</p> <p>4. Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p>	<p>53.675.000</p> <p>46.625.000</p> <p>20.550.000</p> <p>55.205.000</p>
			PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di Daerah	136.450.000
			2. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	13.775.000
			3. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	18.100.200



4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar Tahun 2015 disusun berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap target sasaran yang tercantum pada RPJMD Tahun 2010-2015 dan Perencanaan Strategis (RENSTRA SKPD) Tahun 2010-2015 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar . Adapun pencapaian kinerja diperoleh dari 9 sasaran dengan 22 indikator kinerja.

Secara umum pelaksanaan kegiatan dan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar telah terlaksana dengan baik . Sampai dengan tahun 2015 dapat disimpulkan capaian kinerja Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar telah mencapai target dengan interpretasi yang meningkat.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 sasaran dan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja dapat disimpulkan 15 telah mencapai interpretasi yang meningkat dimana berada pada rentang nilai > 85-100%.

4.2 Saran

Dengan Laporan Akuntabilitas ini maka dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas – tugas kedinasan pada



Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar . Untuk mempertahankan pencapaian indikator sasaran, maka diperlukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian :

- a. Mengingat semakin besarnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar , maka diperlukan dukungan dana yang berkesinambungan dalam pelaksanaan program pada Badan KBPP.
- b. Mengingat adanya kesamaan tujuan dan sasaran antara program di Badan KBPP dengan instansi terkait, maka perlu adanya koordinasi dan kerjasama secara terpadu dalam pelaksanaan program.

Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan KBPP Kota Denpasar , semoga laporan ini bermanfaat dalam memberikan informasi untuk pembangunan Kota Denpasar yang berkelanjutan.

Kepala Badan Keluarga Berencana
Dan Pemberdayaan Perempuan
Kota Denpasar

Ir. I Gusti Agung Laksmi Dharmayanti.M,Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19600505 198603 2 025



LAMPIRAN